

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG
TERKENA KETENTUAN *ABSENTEE* (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 699
PK/Pdt/2016)**

Oleh

Cindy Marito Sihombing, NIM 2214101124

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik atas tanah pertanian yang didalilkan terkena ketentuan kepemilikan tanah secara *absentee* serta akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 1972 tetap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena tidak pernah dibatalkan, dicabut, atau dihapus melalui mekanisme hukum yang berlaku. *Novum* berupa surat administratif tidak secara otomatis menghapus kekuatan pembuktian sertifikat karena tidak memuat tindakan pengambilalihan atau pembatalan hak atas tanah. Tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah yang terkena ketentuan *absentee* juga tidak mengakibatkan hak milik hapus secara otomatis, melainkan dapat menimbulkan akibat hukum berupa pengambilalihan oleh Pemerintah dalam rangka *landreform* dengan pemberian ganti kerugian. Penelitian ini menemukan adanya konflik penerapan norma antara kepastian hukum formal melalui sertifikat dan ketentuan materiil mengenai penguasaan tanah *absentee*. Putusan Mahkamah Agung tetap mempertahankan kekuatan pembuktian SHM dan menyatakan SHGB yang diterbitkan di atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bentuk penyelesaian yang mencerminkan nilai *pro justitia*.

Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik, Tanah *Absentee*, Kekuatan Pembuktian, *Landreform*, *Pro Justitia*.

***JURIDICAL REVIEW OF THE EVIDENTIARY VALUE OF CERTIFICATE
OF OWNERSHIP OVER AGRICULTURAL LAND SUBJECT TO THE
ABSENTEE LAND OWNERSHIP PROVISIONS (A STUDY OF SUPREME
COURT DECISION NUMBER 699 PK/Pdt/2016)***

Oleh

Cindy Marito Sihombing, NIM 2214101124

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the evidentiary value of a Certificate of Ownership over agricultural land alleged to be subject to absentee land ownership provisions and the legal consequences of failure to fulfill the obligation to transfer the land rights based on Supreme Court Decision Number 699 PK/Pdt/2016. This study employs normative legal research using a statutory approach and a case approach. Legal materials were analyzed qualitatively through the interpretation of Law Number 5 of 1960, Government Regulation Number 224 of 1961, Government Regulation Number 41 of 1964, Government Regulation Number 24 of 1997, and Supreme Court Decision Number 699 PK/Pdt/2016. The results show that Certificate of Ownership Number 1 of 1972 retains strong evidentiary value because it has never been annulled, revoked, or removed through the applicable legal mechanisms. The novum in the form of an administrative letter does not automatically eliminate the evidentiary value of the certificate because it does not constitute an act of taking over or annulling the land rights. Failure to fulfill the obligation to transfer rights over agricultural land subject to absentee provisions does not automatically extinguish ownership rights, but may result in the land being taken over by the Government for the implementation of land reform, accompanied by compensation to the former owner. This study also finds a conflict in the application of norms between formal legal certainty through land certificates and substantive provisions concerning absentee land ownership. Nevertheless, the Supreme Court Decision maintains the evidentiary value of the SHM and declares the SHGB issued over the same land to have no legal force, reflecting the value of pro justitia.

Keywords: Certificate of Ownership, Absentee Land, Evidentiary Value, Land reform, Pro Justitia.